

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat sebagai acuan penulis dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan bagi penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Rizal,2012

Penelitian yang dilakukan Muhammad pada 2012 yang berjudul “Pengaruh LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN dan FBIR terhadap BOPO pada bank pembangunan daerah di Jawa”. Permasalahan yang dibahas adalah : apakah rasio LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN dan FBIR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO periode triwulan I tahun 2007 – triwulan II tahun 2011, dan diantara variabel – variabel tersebut mana yang memiliki kontribusi paling dominan pada bank pembangunan daerah di Jawa periode triwulan I tahun 2007 – triwulan II tahun 2011.

Penelitian terdahulu dalam melakukan penelitiannya menggunakan variabel bebas adalah LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN dan FBIR. Sedangkan variabel terikatnya adalah BOPO.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan subyek penelitiannya adalah Bank Pemerintah di Jawa. Data dan

pengumpulan data dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan, neraca dan laba rugi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah metode dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian tersebut adalah analisis regresi linier berganda.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian terdahulu :

1. Berdasarkan uji secara serempak (uji F) diketahui bahwa variabel LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN dan FBIR secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada bank pembangunan Daerah di Jawa .
2. Berdasarkan Uji t rasio LDR, IPR, APB, PPAP, PDN memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap BOPO Bank Pembangunan Daerah di Jawa. Rasio – rasio tersebut memiliki kontribusi masing – masing terhadap BOPO yaitu LDR berkontribusi sebesar 11,76 persen, IPR berkontribusi sebesar 5,52 persen, APB berkontribusi sebesar 2,79 persen, PPAP berkontribusi sebesar 1,66 persen, PDN berkontribusi sebesar 0,12 persen.
3. Berdasarkan uji t NPL dan FBIR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap BOPO Bank Pembangunan Daerah di Jawa periode triwulan I tahun 2007 sampai triwulan II tahun 2011. Rasio-rasio tersebut memiliki kontribusi masing – masing terhadap BOPO yaitu NPL berkontribusi sebesar 0,04 persen, FBIR berkontribusi sebesar 3,20 persen.

Persamaan penelitian Muhammad Rizal dengan penelitian ini terletak pada variabel terikatnya yaitu BOPO, jenis data yang diambil, yaitu data sekunder dan metodenya yaitu dokumentasi. Metode analisis yang digunakan juga analisis regresi linier berganda.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Rizal adalah jangka waktu data yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya dari triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan tahun 2009 sedangkan pada penelitian ini mulai periode oktober 2011-september 2013. Selain itu perbedaan juga terletak pada subyek penelitian, jika pada penelitian sebelumnya menggunakan Bank Pembangunan Daerah di Jawa, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu menggunakan teknik sampling, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sensus. Perbedaan yang mencolok terdapat pada variabel bebas yang digunakan, jika pada penelitian terdahulu menggunakan rasio LDR, IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN dan FBIR maka penelitian sekarang menggunakan variabel bebas yaitu LAR, NPL, PAR, dan Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan yang tidak dalam rasio

2. Rahmatika, April 2011

Judul penelitiannya adalah “Analisis Efektifitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimanakah efektifitas Prosedur mekanisme perguliran dana bergulir Unit Pengelola Kegiatan dilihat dari sisi masyarakat penerima program dana bergulir. Bagaimanakah efektifitas dana bergulir pada Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di kecamatan Situjuh Limo Nagari dilihat dari *Cost Coverage Ratio (CCr)*, *Return on Investment (ROI)*, *Portofolio at Risk (PAR)* dan *Loan at Risk (LAR)* Apakah terdapat perbedaan *Profit Margin*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)* Kelompok SPP sesudah penerimaan dana bergulir dari Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Situjuh.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sensus. Data yang digunakan adalah data primer. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang terdiri dari uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Efektifitas Pengelolaan dana bergulir dipengaruhi oleh tiga hal yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir di tingkat kecamatan, aturan dan prosedur atau mekanisme perguliran, serta pemanfaatan langsung berupa kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dana bergulir kepada anggotanya.
- b. Efektifitas pengelolaan dana bergulir oleh Unit Pengelola kegiatan dapat dilihat dari kinerja UPK tahun 2008-2010. Indikatornya adalah *Loan at Risk (LAR)*, *Portofolio at Risk (PAR)*, *Return On Investment (ROI)* serta *Cost coverage Ratio*

(CCR). Secara umum kinerja UPK semakin membaik dari tahun ketahun. Terutama dengan tidak adanya Kelompok peminjam yang melakukan tunggakan.

- c. Efektifitas Prosedur mekanisme perguliran, yang didapat dari kuesioner yang dibagikan kepada pemanfaat dana bergulir, dianggap sudah efektif baik persepsi umum terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), proses seleksi, proses penyaluran dan pencairan dana serta proses pendampingan.
- d. Terakhir efektifitas dana bergulir pada pemanfaat langsung, untuk *Profit Margin* diterima H_0 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum dana bergulir. Sedangkan untuk Return on asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) H_0 97 ditolak yang mengartikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata setelah dan sebelum perguliran.

Tabel 2.1

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG

NO	ASPEK	Peneliti Terdahulu I Muhammad,2012	Peneliti Terdahulu II Rahmatika,2011	Peneliti sekarang Mohammad R.S
1	Variabel bebas	LDR,IPR, APB, NPL, PPAP, IRR, PDN,FBIR	CCr, LAR, PAR dan ROI	LAR,PAR,NPL, Jumlah KSM,Fasilitator Kecamatan
2	Variabel terikat	BOPO	Efektifitas dana bergulir	BOPO
3	Subyek Penelitian	Bank Pembangunan daerah di Jawa	PNPM Mandiri Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	UPK Simpan Pinjam Perempuan
4	Periode Penelitian	Triwulan I tahun 2007- triwulan II 2011 data Triwulan	2008-2010	Oktober 2011 – September 2013 data Bulanan
5	Metode Penelitian	Sekunder Kuantitatif	Kuisisioner	Data Primer dan Sekunder
7	Teknik Sampling	Purposive Sampling	Purposive sampling	Sensus
8	Teknik Analisis	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Analisis Regresi Linear berganda

Sumber : Data diolah

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah sebagai dasar pemikiran untuk menganalisis serta sebagai dasar untuk melakukan pembahasan guna pemecahan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini berisi tentang hal yang menyangkut tentang penelitian secara teoritis.

2.2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pengadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyeleenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaian, penjamin, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU-RI No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 1:10)

Dalam pertemuan *the World Summit on Micro Credit* di Washington tanggal 2-4 Februari 1997, yang menyatakan bahwa mikro kredit adalah program atau kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya. Selain itu Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan

formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis (Rudjito, 2003).

Badan Kredit Desa (BKD) boleh dibilang sebagai tonggak sejarah berdirinya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Diawali dengan berdirinya Lumbung Desa (LD) pada tahun 1897 oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, Lumbung Desa dan Bank Desa inilah kemudian dikenal dengan nama Badan Kredit Desa (BKD), yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Perkreditan Kecil di Pedesaan atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga ini banyak digunakan sebagai bahan studi banding oleh negara dunia ketiga dalam mengembangkan Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro adalah alat atau wadah untuk pemberdayaan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan ekonomi rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional (Mashudi, 2003). Keberadaan LKM ini sudah mengakar cukup lama dalam masyarakat kita. Perkembangan LKM sebagai suatu usaha keuangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut dikarenakan adanya kebutuhan riil dari masyarakat akibat keterbatasan usaha mikro dan kecil dalam mengakses modal ke perbankan yang disebabkan karena minimnya legalitas dan jaminan yang dimiliki. Disamping itu juga didukung program pemerintah maupun lembaga donor serta lembaga swadaya masyarakat lain yang sangat peduli terhadap UKM.

Di Indonesia kegiatan mikro tumbuh pada skala yang lebih komprehensif, kegiatan tidak sekadar menabung dan meminjam, namun telah menjadi bagian life style di mana segala macam transaksi pendanaan, bisa

dilakukan melalui jalur kegiatan lembaga keuangan. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro antara lain (Mashudi, 2003) :

1. Pelayanan yang diberikan cepat dan mudah
2. Keberadaan LKM lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengenal karakter dari nasabah/peminjam.
3. Secara makro ekonomi, LKM mempunyai keunggulan pendemokrasi perekonomian setempat dari aspek financial maupun sektor riil, karena LKM bisa menarik dan mendayagunakan dana surplus dari masyarakat untuk dialokasikan kepada masyarakat dunia usaha yang memerlukan pembiayaan di daerah yang bersangkutan, sehingga berdampak pada stimulasi penciptaan kegiatan usaha dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam yang ada dalam masyarakat pada skala mikro mempunyai bentuk yang bermacam-macam yang dikelompokkan menjadi dua yaitu (Mashudi, 2003) :

1. LKM bank terdiri dari BRI Unit, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Danamon simpan pinjam yang saat ini mulai masuk ke masyarakat pedesaan.
2. LKM bukan bank yang terdiri dari:
 - a. Formal: Koperasi simpan pinjam/Usaha Simpan Pinjam.
 - b. Non formal antara lain terdiri atas lembaga swadaya masyarakat (LSM) , kelompok swadaya masyarakat (unit ekonomi desa)

Berdasarkan defenisi diatas maka yang termasuk ke dalam lembaga keuangan mikro adalah bank (dari semua jenis), BKD, BPR, KUD, Koperasi,

Asuransi dan pengadaan dan lain-lainnya. Lembaga keuangan Mikro adalah lembaga ekonomi yang sudah memiliki izin resmi dari pemerintah, kegiatannya adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan atau mengeluarkan kredit kepada masyarakat baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang dan jasa. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya Bank Umum. Pada lembaga keuangan mikro ini dapat menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk (Rudjito, 2003) :

1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.
2. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
3. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.
4. Menunjang program Pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

Sementara itu menurut ahli lain, “LKM didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan” (Soetanto Hadinoto, 2005: 72).

Walaupun terdapat banyak definisi LKM, terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut, yaitu:

1. Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan

Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

2. Melayani rakyat miskin

Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.

3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel

Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

2.2.2 Pengertian Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MD)

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan adalah Kelompok simpan pinjam khusus perempuan beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang bergerak di usaha mikro. Usaha mikro seperti ini banyak terdapat di Indonesia yang mampu menopang perekonomian rumah tangga miskin dan bisa menjadi penyangga ekonomi nasional. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan Rumah Tangga Miskin.

Tujuan Khusus dari program ini adalah Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kaum perempuan, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Adapun Ketentuan Dasar dari kegiatan ini, yaitu:

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.
5. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat adalah Kelompok Nasabah group yang menjadi anggota dari Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan, masyarakat difasilitasi oleh Fasilitator kecamatan. Fasilitasi

dalam PNPM mandiri mengandung pengertian membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Fasilitator Kecamatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan Juru kunci keberhasilan PNPM Mandiri perdesaan, penyebaran informasi, pemberdayaan sumber daya manusia ditingkat desa dan kecamatan, untuk mengukur keberhasilan dari fasilitator kecamatan dapat dilihat dari empat fungsi fasilitator yaitu apakah fasilitator sudah menjalankan tugas sebagai, Nara sumber, guru, mediasi dan sebagai prangsang atau penantang.

2.2.3 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu baik dalam neraca maupun laporan laba-rugi (Abdullah, 2003:124). Menurut Kasmir (2009:104), rasio keuangan merupakan perbandingan angka-angka dalam laporan keuangan dengan melakukan perbandingan antar komponennya sehingga menjadi angka dalam satu periode atau beberapa periode.

2.2.3.1 Analisis Rasio Rentabilitas

Penilaian rentabilitas merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dan permodalan.

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari

hubungan timbal balik antarpos, yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antarpos, yang terdapat pada laporan rugi laba bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi bank yang bersangkutan

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 480) penilaian rentabilitas suatu bank terdiri dari :

1. Return on Asset (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset ratio. Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset.

Besarnya ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2. Return on equity (ROE)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 481) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. Kenaikan ROE suatu bank, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan. Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.

Besarnya ROE dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

3. Net Interest Margin (NIM)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 481) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dengan melihat laporan laba rugi pos pendapatan (beban) bunga bersih.

Besarnya NIM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bersih (Pendapatan Bunga - Beban Bunga)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

4. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 482) rasio ini adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena bank bersangkutan dapat menutup biaya (beban) operasional dengan pendapatan operasionalnya.

Besarnya BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

5. Fee Base Income Ratio

Pendapatan operasional diluar bunga

Besarnya FBIR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{FBIR} = \frac{\text{Pendapatan Operasional lagi}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur rentabilitas dari Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan peneliti hanya menggunakan satu rasio yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional rumus (4).

2.2.5.2 Analisis Rasio Likuiditas

Menurut Lukman Dendiwijaya (2009:114) likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat ditagih atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.

Secara umum analisis rasio likuiditas terdiri dari :

1. Cash (CR)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 483) rasio ini untuk mengukur perbandingan alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank yang harus segera dibayar, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah atau depositan pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya.

Besarnya CR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Aktiva Likuid}}{\text{Pasiva Likuid}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

2. Reserve Requirement (RR)

Rasio ini adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada bank indonesia bagi semua bank.

Besarnya RR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$RR = \frac{\text{Giro Wajib Minimum}}{\text{Jumlah DPLH}} \times 100\% \dots\dots\dots (7)$$

3. Loan to asset Ratio (LAR)

Menurut Lukman Dendi Wijaya (2009:117) Loan to asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Rasio ini untuk mengukur LAR yang terjadi di UPK Simpan Pinjam Perempuan. Semakin tinggi rasio ini, tingkat solvabilitasnya semakin kecil, karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya menjadi semakin besar.

Besarnya LAR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LAR = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan diberikan}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\% \dots\dots\dots (8)$$

4. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Menurut Veithzal Rivai (2013 : 484) rasio ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Besarnya LDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$LDR = \frac{\text{Jumlah kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (9)$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur likuiditas dari Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan peneliti hanya menggunakan satu rasio yaitu Loan to asset rasio (LAR) rumus (8).

2.2.5.3 Kualitas Aktiva

Menurut Veithzal Rivai (2007:713) Kualitas asset merupakan rasio untuk penilaian kuantitatif dan kualitas faktor kualitas asset antara lain :

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan total aktiva produktif (AP).
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/non performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif.
- d. tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP).

1. Non Performing Loan

NPL adalah kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet dari total kredit yang diberikan

Non Performing Loan adalah tingkat pengembalian dari keseluruhan kredit yang diberikan kepada debitur. Rasio ini digunakan untuk mengukur kredit bermasalah terhadap total kredit. Semakin tinggi rasio ini semakin buruk kualitas kredit lembaga keuangan yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah semakin besar dan juga menyebabkan pendapatan bunga menjadi menurun dan laba juga mengalami penurunan

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (SEBI No. 13/30/dpnp-16 Desember 2011) :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots \dots \dots (10)$$

2. *Portofolio At Risk* (PAR)

Menurut modul khusus pinjaman bergulir (2012:37) mendefinisikan *Portofolio At Risk* (PAR) adalah indikator yang menunjukkan berapa persen pinjaman yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang tertunggak lebih dari tiga bulan dengan total realisasi saldo pinjaman di UPK. *Portofolio At Risk* (PAR) menunjukkan jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan. Dikatakan BKM dalam kondisi sehat apabila PAR kurang dari 10%, ini berarti bila dana bergulir dikucurkan kepada 24 KSM maka KSM yang bermasalah harus kurang dari 2 KSM. Dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:37) *Portofolio At Risk* (PAR) dapat dirumuskan dengan:

$$PAR = \frac{\text{pinjaman tertunggak} \geq 3 \text{ bulan}}{\text{realisasi saldo pinjaman}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

2.2.5.4 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:38) menjelaskan bahwa Jumlah KSM merupakan jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pinjaman dana bergulir. Ketentuan dalam Modul Khusus Pinjaman Bergulir (2012:38), indikator jumlah KSM ini adalah 100% untuk katagori memuaskan dan 70% untuk katagori minimum atau cukup.

2.2.6 Pengaruh Rasio, LAR, PAR, NPL, Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan Terhadap BOPO

a. Pengaruh *Loan to Asset Ratio* (LAR) Terhadap BOPO

Apabila LAR mengalami peningkatan maka kinerja keuangan semakin likuid.

Dengan demikian biaya operasional mengalami peningkatan dibandingkan pendapatan operasional, sehingga menyebabkan BOPO naik atau sebaliknya. Sehingga hubungan LAR dengan BOPO adalah positif.

b. Pengaruh Non Performing Loan Terhadap BOPO

Apabila perubahan Non Performing Loan mengalami peningkatan, maka biaya operasional akan meningkat, sehingga menyebabkan BOPO meningkat pula. Dengan demikian hubungan Non Performing Load dengan BOPO adalah Positif.

c. Pengaruh PAR Terhadap BOPO

Apabila perubahan PAR mengalami peningkatan, maka beban operasional akan meningkat dibanding pendapatan operasional. sehingga menyebabkan BOPO meningkat atau sebaliknya. Sehingga hubungan PAR dengan BOPO adalah Positif.

d. Pengaruh Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Terhadap BOPO

Jumlah KSM memiliki hubungan positif atau negatif terhadap BOPO.

Apabila jumlah KSM yang menerima kredit meningkat diiringi dengan Jumlah KSM produktif atau kredit yang diberikan lancar. Berarti peningkatan jumlah KSM akan memberikan penambahan pendapatan berupa pendapatan bunga pinjaman dan akan meningkatkan laba, sehingga BOPO akan menurun. Dengan demikian hubungan antara Jumlah KSM dengan BOPO adalah Negatif.

Dikatakan hubungan Positif apabila peningkatan Jumlah KSM meningkat dan peningkatannya tidak diiringi dengan Jumlah KSM yang produktif atau kredit

yang diberikan PNPM Mandiri adalah kredit macet atau tidak terbayar. Hal ini berarti peningkatan Jumlah KSM akan menimbulkan biaya untuk mengcover kredit yang tidak terbayar sehingga akan mengurangi pendapatan dan laba akan mengalami penurunan, dengan demikian posisi BOPO akan mengalami peningkatan. Dengan demikian hubungan Jumlah KSM dengan Bopo adalah Positif.

e. Pengaruh Fasilitator Kecamatan Terhadap BOPO

Jumlah Fasilitator akan mempengaruhi efisiensi dari PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri Lebih banyak belum tentu menjamin kinerja dari para fasilitator ,tapi sedikitnya fasilitator juga akan mempengaruhi proses penyebaran informasi tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan. Sehingga menyebabkan Hubungan Fasilitator Kecamatan dengan BOPO bisa berpengaruh Positif atau Negatif.

Dikatakan positif jika Jumlah fasilitator meningkat diikuti dengan kualitas KSM yang meningkat, dikatakan negatif jika fasilitator meningkat tidak dibarengi dengan kualitas KSM..

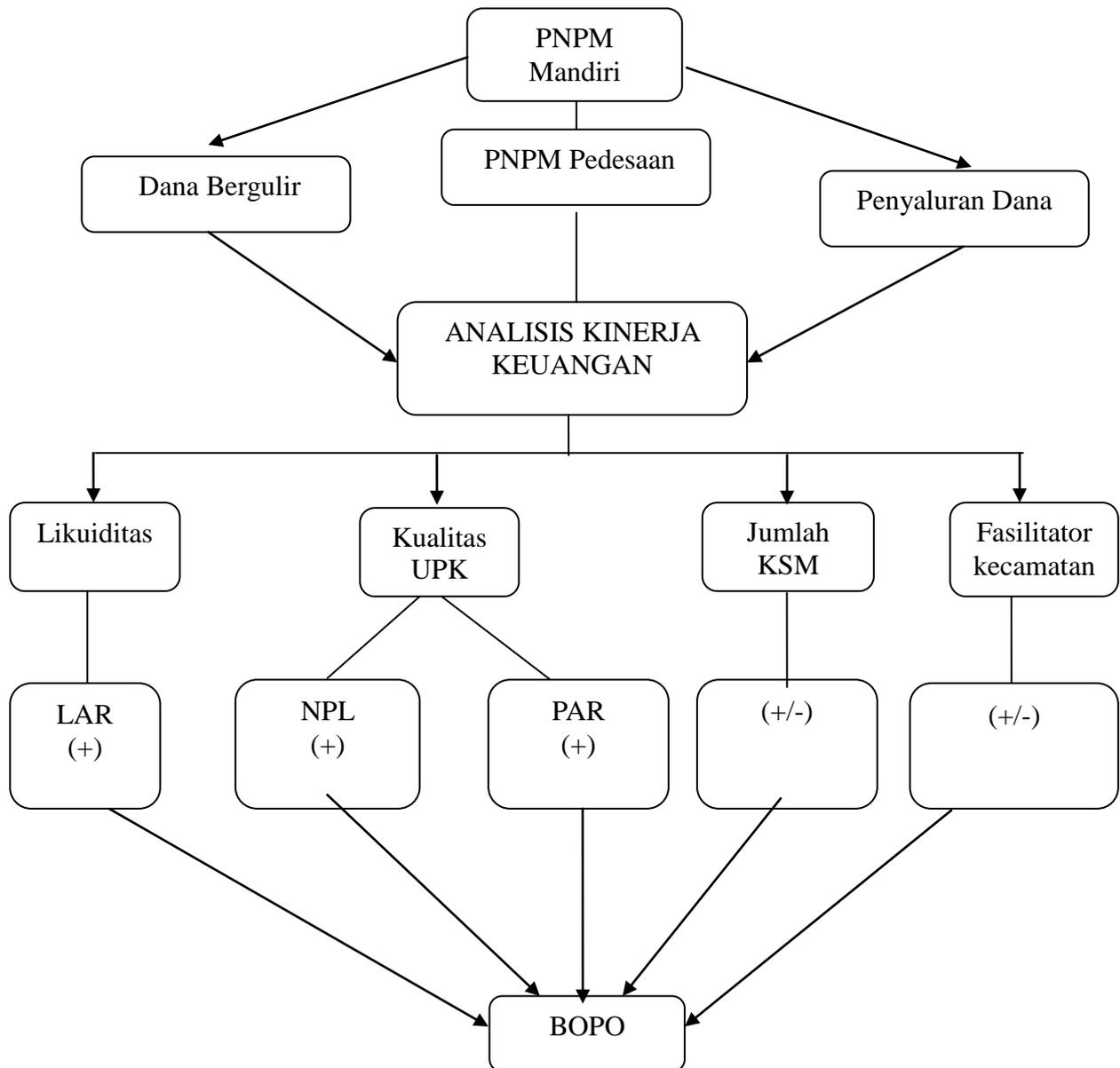
2.2.7 Pengertian Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua

disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari landasan teori yang ada dalam penelitian ini dapat pula digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dalam kegiatan pelaksanaan PNPB-Mandiri Pedesaan khususnya Unit Pengelola Kegiatan simpan pinjam perempuan, akan mengeluarkan biaya operasional yang akan mempengaruhi biaya operasional dari UPK-SPP dikabupaten Sidoarjo.

Sedangkan pada kegiatan yang bersifat menyalurkan dana dapat berjalan

jika dana yang digulirkan oleh pemerintah ke PNPM-Mandiri perdesaan Sidoarjo sudah disalurkan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit, (UPK-SPP). Konsekuensi dari kegiatan penyaluran dana ini, UPK-SPP akan memperoleh pendapatan. Dari gambar diatas, variabel-variabel terdiri dari LAR, NPL, PAR, Jumlah KSM dan Fasilitator Kecamatan masing-masing mempunyai pengaruh yang positif atau negatif terhadap pertumbuhan BOPO.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan konsep – konsep teori yang diajukan, maka hipotesis yang disajikan sebagai berikut :

1. Variabel LAR, PAR, NPL, Jumlah KSM, dan Fasilitator Kecamatan secara bersama sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo
2. Variabel LAR mempunyai pengaruh Positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Variabel NPL mempunyai pengaruh Positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo
4. Variabel PAR mempunyai pengaruh Positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo
5. Jumlah KSM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
6. Fasilitator Kecamatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.